

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Rezki Zairullah Amroni
NPP. 32.0912
Asdaf Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 32.0912@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Herson Simbolon, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional governments are key actors in implementing poverty alleviation programs, yet the persistent rate of poverty in several areas indicates gaps in institutional capacity, program sustainability, and resource allocation. Although various social assistance and empowerment programs have been introduced, many have not produced significant long-term impact. This raises the question of how effectively local institutions, particularly the Social Service Office, perform their role in managing poverty-related issues. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Social Service Office in poverty alleviation at the regional level, particularly in terms of institutional strategies, program implementation, and the challenges faced in creating sustainable outcomes. **Method:** A qualitative descriptive method was employed, using in-depth interviews, observation, documentation, and source triangulation. The research uses role theory as formulated by Biddle & Thomas as the analytical framework. **Result:** The findings indicate that the Social Service Office contributes through programs such as economic empowerment, social assistance distribution, and community training. However, there are barriers such as limited funding, bureaucratic inefficiencies, and lack of coordination with other agencies. **Conclusion:** Strengthening inter-agency collaboration, increasing community participation, and improving institutional responsiveness are critical to enhancing the effectiveness of local poverty alleviation efforts.

Keywords: Poverty, Local Government, Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Namun, masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan, keberlanjutan program, dan alokasi sumber daya. Meskipun berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan telah dijalankan, dampak jangka panjangnya belum signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif peran Dinas Sosial dalam mengelola isu-isu kemiskinan secara langsung di tingkat daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, khususnya terkait strategi kelembagaan, pelaksanaan program, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan hasil yang berkelanjutan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Biddle & Thomas sebagai kerangka analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas

Sosial berkontribusi melalui program pemberdayaan ekonomi, penyaluran bantuan sosial, dan pelatihan masyarakat. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. **Kesimpulan:** Penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan responsivitas kelembagaan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. **Kata Kunci:** Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program strategis yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak implementasi kebijakan sosial, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa program-program tersebut menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan berkelanjutan.

Penelitian (Ma'ruf, 2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang melalui bidang pendidikan mampu meningkatkan akses sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, meskipun masih menghadapi tantangan pada tingkat pelaksana kebijakan yang belum optimal. Temuan ini senada dengan (Handayani & Tumija, 2016) yang mengungkap keberhasilan strategi terpadu di Kabupaten Sukabumi melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dengan pendekatan lintas sektor yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pengendalian populasi.

Namun, efektivitas program tidak semata ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks desentralisasi, (Nursini & Tawakkal, 2019) menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah dan transfer antarpemerintah memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, berbeda dengan belanja daerah yang tidak selalu berdampak langsung. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah harus diarahkan pada peningkatan ruang fiskal yang memungkinkan pembiayaan program pengentasan kemiskinan secara lebih prioritatif dan terfokus.

Berbagai studi internasional juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Di Tiongkok, strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan secara spasial terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan kronis di wilayah geografis terpencil (Liu et al., 2017). Sementara di Afrika, krisis multidimensi antara kemiskinan, gizi buruk, dan penyakit menjadi isu yang kompleks yang membutuhkan intervensi lintas sektor dan tata kelola yang kuat (Adeyeye et al., 2021; Dake & Christian, 2023). Infrastruktur juga menjadi faktor penting: (Sewell et al., 2019) menemukan bahwa akses jalan yang memadai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi isolasi sosial-ekonomi.

Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan juga menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, (Saputra, 2018) menemukan bahwa Program KUBE di Bandar Lampung mampu meningkatkan pendapatan peserta, walaupun masih menghadapi kendala dalam manajemen dan akses modal. Hal ini didukung oleh (Pradana & Widiyahseno, 2022) yang mengungkap bahwa pelatihan keterampilan seperti kerajinan dan budidaya lele bagi penyandang disabilitas di Ponorogo dapat meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok rentan.

Studi dari India juga memperkuat argumen pentingnya pendekatan terpadu. (Singh & Chudasama, 2020) menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang hanya mengandalkan satu pendekatan seperti mikrofinansial atau pertumbuhan ekonomi tidak cukup

efektif; dibutuhkan kombinasi antara jaminan sosial, penguatan kapabilitas, tata kelola yang baik, dan inklusi sosial untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Melalui berbagai temuan tersebut, jelas bahwa peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan sangat kompleks, mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, serta hubungan antaraktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah—dalam hal ini dinas sosial dan perangkat terkait—melaksanakan perannya dalam mengurangi angka kemiskinan, kendala yang dihadapi dalam implementasi program, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan secara lokal dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah, melalui perangkat teknis seperti Dinas Sosial, memiliki mandat strategis dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan bantuan langsung. Namun demikian, ketimpangan hasil yang dicapai antara daerah satu dengan lainnya menunjukkan adanya perbedaan efektivitas dalam implementasi kebijakan. Beberapa daerah mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sementara lainnya masih menghadapi stagnasi meskipun alokasi anggaran dan program telah dijalankan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran aktual pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam pengentasan kemiskinan, khususnya dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada evaluasi output program secara kuantitatif atau menyoroti peran pemerintah pusat, seperti efektivitas bantuan sosial skala nasional, tanpa membedah secara spesifik dinamika kelembagaan di tingkat daerah. Studi (Ma'ruf, 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program yang dijalankan, tetapi juga pada kolaborasi aktor kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal. Sementara itu, (Nursini & Tawakkal, 2019) menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah melalui desentralisasi fiskal dapat memperluas ruang fiskal, tetapi tidak serta-merta efektif jika tidak diarahkan pada belanja prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, (Saputra, 2018) mengungkapkan bahwa banyak program pemberdayaan sosial yang berhasil pada tahap awal, namun gagal berkelanjutan karena lemahnya kapasitas kelembagaan, akses pasar, dan dukungan modal. Dalam konteks inilah, peran Dinas Sosial sebagai institusi pelaksana kebijakan menjadi penting untuk ditelaah secara lebih mendalam, tidak hanya dalam hal administratif, tetapi juga dari sisi strategis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, studi internasional seperti (Liu et al., 2017) di Tiongkok dan (Singh & Chudasama, 2020) di India menunjukkan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan yang bersifat terarah, berbasis data, serta melibatkan integrasi multisektor jauh lebih efektif dalam menjangkau kelompok miskin ekstrem. Namun, belum banyak studi di Indonesia yang membedah bagaimana pemerintah daerah—khususnya Dinas Sosial—menerjemahkan pendekatan seperti ini ke dalam praktik yang kontekstual dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya celah riset dalam memahami kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kesenjangan peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, baik dalam hal strategi kelembagaan, efektivitas pelaksanaan program, maupun tantangan struktural dan sumber daya yang dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model intervensi sosial yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks lokal sebagai bagian dari tata kelola pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

(Pradana & Widiyahseno, 2022) dalam penelitiannya mengenai masyarakat miskin penyandang disabilitas di Ponorogo mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan dan budidaya lele. Program ini memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan pendapatan mandiri dan membuka akses terhadap kesejahteraan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi berbasis keterampilan sebagai upaya struktural pengentasan kemiskinan bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, (Utama et al., 2023) mengkaji efektivitas pelayanan BPJS gratis di Kota Mataram dan menemukan bahwa layanan tersebut telah membantu masyarakat miskin memperoleh akses kesehatan. Namun, efektivitas layanan masih terhambat oleh sistem administrasi yang rumit dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan penguatan SDM pelaksana untuk meningkatkan dampak program sosial berbasis jaminan kesehatan.

(Ma'ruf, 2022) dalam studinya di Kabupaten Karawang menyoroti implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan fasilitas pendidikan, perluasan akses, dan penurunan jumlah anak putus sekolah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya pelaksana kebijakan yang kurang simpatik. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara aktor kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

(Saputra, 2018) mengulas efektivitas Program KUBE di Bandarlampung dan menyimpulkan bahwa program ini secara umum berhasil meningkatkan pendapatan dan fungsi sosial peserta. Namun, faktor penghambat seperti lemahnya manajemen, keterbatasan modal, dan minimnya akses pasar mengurangi efektivitasnya. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sosial sangat bergantung pada kualitas SDM dan dukungan kelembagaan yang konsisten.

(Marthalina, 2018) menyoroti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi kemiskinan melalui 25 program lintas sektor. Meskipun capaian ekonomi meningkat, masih terdapat hambatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, terutama di kawasan padat penduduk. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus dibarengi pemerataan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh.

(Murdiyana & Mulyana, 2017) melakukan telaah *Longitudinal* terhadap strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dari masa Orde Lama hingga pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menyimpulkan bahwa program-program seperti Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan Nawacita menunjukkan fokus yang kuat pada pengurangan kemiskinan struktural melalui peningkatan layanan dasar. Namun, konsistensi dan integrasi lintas sektor tetap menjadi tantangan utama dalam realisasi kebijakan tersebut.

(Handayani & Tumija, 2016) meneliti strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dan menemukan bahwa pendekatan terpadu melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) cukup efektif. Strategi tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian populasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pelibatan multisektor sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan program.

(Nursini & Tawakkal, 2019) dalam *jurnal Economics & Sociology* menunjukkan bahwa dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pendapatan asli daerah dan transfer antarpemerintah lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan belanja daerah. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan fiskal di tingkat daerah untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai dalam mendanai program pengentasan kemiskinan.

(Zhang et al., 2019) melalui studi di Tiongkok tentang pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya untuk pengentasan kemiskinan menemukan bahwa pendekatan berbasis energi dapat mengurangi ketimpangan multidimensi. Mereka menunjukkan bahwa integrasi sumber daya terbarukan dalam strategi ekonomi lokal menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Hal ini memberikan wawasan bahwa inovasi teknologi juga berperan dalam strategi pengentasan kemiskinan.

(Dake & Christian, 2023) meneliti hubungan antara kemiskinan energi dan malnutrisi rumah tangga di Afrika Sub-Sahara dan menemukan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik dan menggunakan biofuel berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan energi dapat memperburuk kondisi kesehatan dan memperluas beban kemiskinan multidimensi, sehingga perlu ditangani dalam kebijakan sosial secara lebih integratif.

(Adeyeye et al., 2023) dalam ulasanya mengenai kemiskinan, malnutrisi, dan penyakit di Afrika menjelaskan bahwa ketiga isu tersebut saling terkait dan diperburuk oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, buruknya infrastruktur kesehatan, serta konflik bersenjata. Meskipun Afrika kaya sumber daya alam, kemiskinan ekstrem masih merajalela, ditandai dengan kelangkaan kebutuhan dasar dan tingginya angka kekurangan gizi. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi ini, memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada tata kelola ekonomi dan sosial yang efektif.

(Sewell et al., 2019) melalui studi komparatif di dua komunitas pedesaan Afrika Selatan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Komunitas dengan akses jalan yang memadai memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan komunitas yang terisolasi. Studi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk menjamin akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

(Liu et al., 2017) meneliti pola spasial dan temporal kemiskinan pedesaan di Tiongkok serta strategi pengentasan berbasis wilayah. Mereka menemukan bahwa kemiskinan terkonsentrasi di daerah pegunungan terpencil dan wilayah minoritas etnis. Strategi penanggulangan yang mereka usulkan bersifat terarah, berkelanjutan, dan berdiferensiasi berdasarkan faktor geografi dan penyebab struktural kemiskinan seperti kondisi ekologis dan keterbatasan sumber daya alam. Temuan ini mendukung pendekatan yang berbasis data dan lokalitas dalam pengentasan kemiskinan.

(Singh & Chudasama, 2020) dalam studinya di India mengevaluasi efektivitas berbagai strategi pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan Fuzzy Cognitive Maps (FCM). Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang efektif; sebaliknya, dibutuhkan integrasi antara mikrofinansial, pembangunan kapabilitas, jaminan sosial, tata kelola yang baik, dan pendekatan pasar. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman sistemik dan kontekstual untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

(Nursini & Tawakkal, 2019) dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah, baik dari sumber asli maupun transfer antarpemerintah, berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan belanja daerah secara umum tidak menunjukkan dampak signifikan. Studi ini menyarankan agar proporsi belanja diarahkan ke program prioritas yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, bukan hanya pada operasionalisasi pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan kelembagaan yang lebih kontekstual dalam menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan diri pada evaluasi program secara makro atau dampak kebijakan nasional, seperti bantuan sosial tunai,

subsidi, dan perlindungan sosial secara umum. Sementara itu, aspek peran kelembagaan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama program pengentasan kemiskinan di daerah masih jarang dikaji secara mendalam, terutama dari sudut strategi, kendala operasional, serta koordinasi lintas sektor di tingkat lokal.

Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana Dinas Sosial menjalankan peran dengan menekankan dimensi ekspektasi institusional, perilaku aktual, dan dinamika hubungan antara aktor pelaksana kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat. Kebaruan lainnya terletak pada pengembangan indikator peran kelembagaan yang mencakup aspek strategi pemberdayaan, pemetaan sosial, serta efektivitas program dalam menjangkau kelompok rentan secara langsung, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan pekerja informal miskin.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kegiatan, yang memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap praktik-praktik kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baik secara konseptual maupun praktis dalam pengembangan model intervensi sosial berbasis kelembagaan yang responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Secara khusus, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana Dinas Sosial menjalankan fungsi kelembagaannya dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan peran tersebut, serta menggambarkan berbagai strategi yang ditempuh oleh Dinas Sosial dalam menjawab tantangan struktural, teknis, maupun sosial dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh, dengan menekankan pada pemahaman konteks kelembagaan, praktik pelaksanaan program, serta dinamika hubungan antaraktor dalam proses kebijakan sosial di tingkat lokal (Sugiyono, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap delapan informan yang terdiri dari pejabat dan staf teknis Dinas Sosial, pendamping program bantuan sosial, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program pengentasan kemiskinan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan dokumentasi mencakup dokumen perencanaan, laporan kegiatan, serta regulasi pendukung di bidang kesejahteraan sosial.

Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, Matthew.B; Huberman, 2002) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setiap data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam enam dimensi fungsi pemerintahan daerah menurut (Biddle & Thomas, 2007), yaitu pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, koordinasi, dan pengawasan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode,

guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan dalam menarik kesimpulan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran Fungsi Pemerintahan Daerah Achmad KM & Baharuddin Zubakhrom. Teori ini memetakan peran kelembagaan pemerintah daerah ke dalam enam dimensi utama, yaitu pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, koordinasi, dan pengawasan. Keenam dimensi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam konteks sosial ekonomi masyarakat miskin, termasuk dalam merancang program, melibatkan aktor lintas sektor, serta mengatasi hambatan struktural dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat tidak hanya bentuk formal peran Dinas Sosial, tetapi juga bagaimana fungsi tersebut dijalankan secara nyata dalam dinamika kelembagaan dan sosial masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

3.1. Fungsi Pelayanan Publik

Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu peran utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan pelayanan dasar dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi akses terhadap kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat rentan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari internal Dinas Sosial, ditemukan bahwa berbagai program seperti bantuan sosial non-tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan pemerintah (BPP) telah rutin disalurkan kepada kelompok miskin terdata. Namun, pelaksanaan pelayanan ini masih menghadapi tantangan administratif, seperti keterbatasan data yang akurat dan dinamika perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, aspek kesejahteraan sosial dalam fungsi pelayanan publik juga dijalankan melalui pemberian rehabilitasi sosial, layanan anak terlantar, dan perlindungan terhadap lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto menjalankan peran ini dengan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) dan menjalin kerja sama dengan panti asuhan serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lokal. Namun, dari hasil observasi dan dokumentasi, masih terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan layanan sosial secara menyeluruh, khususnya di daerah pelosok yang sulit dijangkau.

Walaupun demikian, keberadaan layanan pengaduan masyarakat serta mobilisasi petugas lapangan menjadi salah satu bentuk responsivitas Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung. Dalam praktiknya, partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif dalam mendekati layanan kepada sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas institusional yang tersedia.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan adanya peran nyata, namun memerlukan penguatan pada aspek distribusi layanan, validitas data, dan pendekatan partisipatif agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

3.2. Fungsi Pembangunan

Dalam fungsi pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Jenepono berperan sebagai institusi teknis yang turut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini tercermin dari keterlibatan Dinas Sosial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat desa maupun kecamatan. Melalui forum ini, Dinas Sosial mengusulkan program-program strategis seperti peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penguatan pendampingan sosial, dan perbaikan sistem perlindungan sosial berbasis data.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam perencanaan pembangunan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan lintas perangkat daerah lain. Selain itu, pendekatan pembangunan yang dilakukan masih dominan berbasis proyek tahunan ketimbang pembangunan jangka panjang berbasis pemetaan kebutuhan riil masyarakat miskin. Akibatnya, beberapa program yang dicanangkan cenderung bersifat reaktif, bukan transformatif.

Meski demikian, terdapat upaya pembaruan dalam menyusun basis data terpadu kemiskinan yang menjadi referensi utama dalam perencanaan program. Namun, akurasi dan pemutakhiran data menjadi persoalan tersendiri, karena ketergantungan pada laporan lapangan dan minimnya penggunaan sistem informasi terpadu. Hal ini menegaskan bahwa meskipun fungsi pembangunan telah dijalankan, Dinas Sosial masih perlu memperkuat kapasitas analisis sosial, pemetaan spasial kemiskinan, serta integrasi perencanaan berbasis bukti untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan mencerminkan kemampuan Dinas Sosial dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Jenepono memiliki sejumlah regulasi teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan program seperti Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran bantuan sosial, pedoman KUBE, serta SOP layanan perlindungan sosial. Meski demikian, peran normatif Dinas Sosial dalam menetapkan kebijakan cenderung terbatas pada tataran pelaksana, karena regulasi strategis umumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Keterbatasan kewenangan ini menyebabkan Dinas Sosial lebih bersifat administratif dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan. Kendati demikian, terdapat inisiatif lokal berupa penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, dari segi implementasi, belum semua kebijakan lokal tersebut memiliki kekuatan hukum yang memadai karena belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan daerah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengaturan belum sepenuhnya berjalan optimal. Diperlukan penguatan kapasitas regulatif Dinas Sosial agar dapat menghasilkan kebijakan responsif yang sesuai dengan konteks lokal dan mampu mengisi kekosongan teknis di lapangan dalam penanggulangan kemiskinan.

3.4. Fungsi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan, Dinas Sosial Kabupaten Jenepono berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha untuk KUBE, serta pendampingan sosial merupakan bentuk nyata dari upaya pemberdayaan tersebut. Pelaksanaan program ini melibatkan penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pendamping lokal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi sebagian penerima manfaat, terutama pada kelompok produktif seperti perempuan kepala keluarga dan pemuda pengangguran. Namun, belum semua program pemberdayaan disertai dengan strategi keberlanjutan, seperti akses pasar, pelatihan lanjutan, atau penguatan jaringan usaha.

Selain itu, proses seleksi penerima manfaat masih menghadapi tantangan, termasuk dalam menjangkau kelompok rentan yang tidak terdata secara administratif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada penguatan komunitas, bukan hanya pemberian bantuan sesaat. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi pemberdayaan sangat bergantung pada kesinambungan program, konsistensi pendampingan, dan dukungan kebijakan lintas sektor.

3.5. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi dua bentuk utama: koordinasi antarinstansi pemerintah dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti LSM, dunia usaha, dan komunitas lokal. Dalam praktiknya, koordinasi lintas perangkat daerah seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Bappeda dilakukan dalam forum-forum perencanaan dan pelaksanaan program, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Namun demikian, koordinasi ini belum berjalan secara sinergis karena masih ditemui ego sektoral, perbedaan skema anggaran, dan lemahnya sistem monitoring terpadu. Hal ini berdampak pada tumpang tindih program dan keterbatasan cakupan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif.

Sementara itu, kolaborasi dengan pihak eksternal cenderung bersifat sporadis dan berbasis proyek, belum menjadi kemitraan jangka panjang. Padahal, pelibatan multipihak sangat penting untuk memperluas sumber daya, memperkuat inovasi program, serta memastikan keberlanjutan intervensi sosial. Oleh karena itu, penguatan fungsi koordinasi harus diarahkan pada pembangunan jejaring kelembagaan yang solid, sistem integrasi data lintas sektor, serta pelembagaan forum kolaboratif berbasis wilayah.

3.6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan Dinas Sosial mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan pengawasan eksternal terhadap pemanfaatan bantuan oleh masyarakat. Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja, pelaporan berkala, serta audit program oleh inspektorat daerah. Meskipun secara administratif prosedur pengawasan telah dilaksanakan, terdapat keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang menyebabkan evaluasi lebih bersifat administratif daripada substantif.

Sementara itu, pengawasan eksternal masih menghadapi tantangan besar. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengaduan, lemahnya kontrol sosial, serta belum optimalnya fungsi monitoring oleh mitra non-pemerintah menyebabkan praktik penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran masih ditemukan. Keberadaan sistem informasi pengaduan dan posko pengawasan bantuan sosial telah dimulai, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Dengan demikian, untuk memperkuat fungsi pengawasan, Dinas Sosial perlu memperluas kanal pelaporan yang ramah masyarakat, meningkatkan transparansi program, serta memperkuat kapasitas audit sosial berbasis komunitas. Fungsi pengawasan yang efektif akan menjadi penopang penting dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan dijalankan melalui enam dimensi fungsi pemerintahan daerah, yaitu pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, koordinasi, dan pengawasan. Pelaksanaan keenam fungsi ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki posisi strategis dalam mendistribusikan bantuan sosial, mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta membangun sistem pelayanan sosial yang inklusif. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, temuan ini mengindikasikan adanya kesadaran kelembagaan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga melibatkan intervensi kelembagaan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Jika dikaitkan dengan teori peran, maka Dinas Sosial telah menunjukkan upaya untuk menjalankan peran fungsionalnya dalam kerangka kebijakan publik. Dalam dimensi pelayanan publik, misalnya, Dinas Sosial berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui distribusi bantuan dan akses layanan sosial. Sementara itu, pada dimensi pembangunan dan pemberdayaan, institusi ini telah berpartisipasi aktif dalam perencanaan program ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan. Namun, terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang adil dan responsif dengan kapasitas aktual kelembagaan dalam menjangkau seluruh kelompok miskin secara merata.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Ma'ruf, 2022), yang menekankan pentingnya konfigurasi aktor kebijakan dan pelaksana teknis dalam menjamin keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Dalam kasus Jeneponto, masih ditemukan hambatan dalam bentuk data yang tidak akurat, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta keterbatasan anggaran. Hal ini juga diperkuat oleh temuan (Nursini & Tawakkal, 2019) bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah belum selalu dibarengi dengan efektivitas belanja sosial yang tepat sasaran.

Fungsi koordinasi dan pengawasan Dinas Sosial juga menghadapi tantangan struktural. Koordinasi antarinstansi belum berjalan secara sistematis, dan pengawasan program masih bersifat administratif dibandingkan substantif. Seperti diungkapkan oleh (Saputra, 2018), keberhasilan program pemberdayaan sosial sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan dan integrasi kebijakan antar sektor. Dalam konteks Jeneponto, koordinasi dengan pihak eksternal seperti LSM atau swasta masih belum terbangun secara konsisten, sehingga banyak inisiatif program bersifat sektoral dan jangka pendek.

Wujud pelaksanaan fungsi Dinas Sosial menunjukkan adanya niat baik untuk menurunkan angka kemiskinan, namun belum seluruhnya ditopang oleh sistem kelembagaan yang responsif dan adaptif. Beberapa program unggulan seperti KUBE dan bantuan sosial bersyarat sudah berjalan, namun belum dibarengi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Pendekatan intervensi pun masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya memfasilitasi partisipasi aktif dari komunitas lokal.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan masih berada pada tahap fungsional-administratif, dan memerlukan penguatan dari sisi strategi kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta pendalaman pendekatan berbasis komunitas. Reformasi kelembagaan melalui pemutakhiran data kemiskinan, integrasi program lintas OPD, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi arah penting dalam memperkuat efektivitas fungsi Dinas Sosial ke depan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Melalui enam dimensi fungsi pemerintahan daerah—pelayanan publik, pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, koordinasi, dan pengawasan—Dinas Sosial berupaya menjalankan peran kelembagaannya secara menyeluruh, baik melalui bantuan sosial langsung, program pemberdayaan ekonomi, maupun sinergi dengan pihak internal dan eksternal.

Peran pelayanan publik Dinas Sosial telah terwujud dalam penyediaan akses bantuan dasar dan perlindungan sosial, meskipun masih dihadapkan pada tantangan data dan jangkauan wilayah. Dalam dimensi pembangunan, keterlibatan dalam perencanaan strategis telah dilakukan, namun belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan lokal yang akurat. Fungsi pengaturan menunjukkan adanya adaptasi kebijakan pusat ke dalam konteks lokal, namun otonomi regulatif masih terbatas. Sementara itu, fungsi pemberdayaan telah mendorong kemandirian masyarakat melalui program ekonomi produktif, namun keberlanjutannya masih bergantung pada dukungan modal dan pendampingan lanjutan. Fungsi koordinasi dan pengawasan menunjukkan bahwa integrasi antarinstansi dan mekanisme evaluasi masih perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program berjalan secara optimal.

Dengan mengacu pada teori peran Marilee S. Grindle, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Dinas Sosial masih bersifat fungsional-administratif dan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat miskin di daerah. Penguatan peran ini dapat diwujudkan melalui integrasi lintas sektor, pemutakhiran data kemiskinan berbasis wilayah, serta perluasan jejaring kolaboratif dengan komunitas lokal dan mitra pembangunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup lokasi penelitian hanya terbatas pada Kabupaten Jeneponto, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, jumlah informan yang diwawancarai terbatas karena keterbatasan waktu dan akses terhadap aktor-aktor strategis, yang berdampak pada kedalaman eksplorasi dalam beberapa dimensi. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam memperoleh dokumen-dokumen internal Dinas Sosial yang bersifat sensitif atau belum dipublikasikan, sehingga beberapa interpretasi dilakukan berdasarkan triangulasi dari narasi dan observasi lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk membandingkan peran Dinas Sosial di daerah lain, baik di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi maupun yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau mixed-method dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program berdasarkan persepsi penerima manfaat, indikator capaian kinerja, dan pengaruhnya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada evaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan data terpadu kemiskinan, serta pada strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada informan dari Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto yang telah meluangkan waktu, berbagi informasi, dan memberikan akses terhadap data yang sangat

dibutuhkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, koreksi, dan motivasi yang tak henti-hentinya selama proses penelitian berlangsung. Tak lupa, apresiasi diberikan kepada keluarga, teman, dan seluruh pihak yang turut memberikan semangat dan bantuan moral dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan peran kelembagaan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adeyeye, S. A. O., Ashaolu, T. J., Bolaji, O. T., Abegunde, T. A., & Omoyajowo, A. O. (2023). Africa and the Nexus of poverty, malnutrition and diseases. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(5), 641–656. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1952160>
- Biddle, & Thomas. (2007). *Role Theory : Concept and Research*. Wiley.
- Dake, F. A. A., & Christian, A. K. (2023). Cold, dark and malnourished: a cross-sectional analysis of the relationship between energy poverty and household burden of malnutrition in sub-Saharan Africa. *BMJ Open*, 13(12), 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-074601>
- Handayani, N., & Tumija, T. (2016). Strategi Pengendalian Kemiskinan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 37. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.149>
- Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. *Journal of Rural Studies*, 52, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.002>
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the Poverty Reduction Acceleration Policy in Karawang Regency, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715>
- Marthalina, M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–24. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403>
- Miles, Matthew.B; Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher ' s Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di indonesia. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN*, 10(1), 73–96.
- Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the contexof fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(1), 270–285. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16>
- Pradana, I., & Widiyahseno, B. (2022). Potret Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Di Ponorogo : Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 72–81. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2578>
- Saputra, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 111–129. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i2.521>
- Sewell, S. J., Desai, S. A., Mutsaa, E., & Lottering, R. T. (2019). A comparative study of community perceptions regarding the role of roads as a poverty alleviation strategy in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 71(March), 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.001>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Utama, P. N., Hidayat, R., & Nazwin, A. H. (2023). Gambaran Pelayanan Bidang Penanganan

Kemiskinan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 72–90. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3358>

Zhang, H., Xu, Z., Wu, K., Zhou, D., & Wei, G. (2019). Multi-dimensional poverty measurement for photovoltaic poverty alleviation areas: Evidence from pilot counties in China. *Journal of Cleaner Production*, 241(2019), 118382. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118382>

